

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Tujuan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Mengenai Sengketa Ganti Kerugian Pelepasan Tanah Adat.....	18
1. Sengketa.....	18
2. Ganti Kerugian.....	20
a. Ganti Kerugian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	20

b. Ganti Kerugian dalam Penggunaan Tanah Ulayat.....	21
3. Pelepasan Tanah Adat.....	27
a. Tanah Adat.....	27
b. Pelepasan Hak atas Tanah Adat (ulayat).....	33
c. Tanah Adat untuk Usaha Perkebunan.....	36
d. Hak Atas Tanah untuk Usaha Perkebunan.....	51
B. Tinjauan Mengenai Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat dan Pengadilan Negeri.....	54
1. Penyelesaian Sengketa Pertanahan.....	54
2. Peradilan Adat.....	57
a. Peradilan Adat dalam Hukum Positif Indonesia.....	57
b. Kewenangan Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kalimantan Tengah.....	59
c. Organ Peradilan Adat	60
d. Jenjang Peradilan Adat	61
e. Jenis Sanksi Peradilan Adat.....	62
f. Putusan Peradilan Adat	62
3. Peradilan Umum.....	63
a. Kewenangan Peradilan Umum.....	63
b. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kalimantan Tengah.....	64
c. Biaya Beracara di Pengadilan Negeri.....	65
d. Pembuktian Perkara Perdata.....	65
BAB III METODE PENELITIAN.....	74
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	74
B. Data Penelitian.....	75
1. Data Sekunder.....	75
2. Data Primer.....	80

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	82
D. Jalannya Penelitian.....	85
E. Analisis Data Hasil Penelitian.....	86
1. Analisis Data Sekunder.....	87
2. Analisis Data Primer.....	100
F. Kesulitan Penelitian.....	103
G. Jadwal Penelitian.....	104
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	105
A. Karakteristik Geografis, Administratif dan Sosial Budaya Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.....	105
B. Potensi Daerah.....	108
C. Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Taboyan.....	110
D. Tanah Adat Suku Dayak Taboyan.....	115
E. Hubungan Tanah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Barito Utara.....	126
F. Desa Adat dalam Struktur Pemerintahan Formal dan Pemerintahan Substantif.....	129
G. Kesepakatan Penyerahan Tanah Adat, IUP dan HGU untuk Usaha Perkebunan.....	135
H. Proses Pelepasan Tanah Adat Kepada Pelaku Usaha Perkebunan.....	141
1. Di Desa Butong	141
2. Di Desa Kemawen.....	154
I. Dasar Hukum Penetapan Nilai Ganti Kerugian Pelepasan Tanah Adat untuk Kegiatan Non-Kepentingan Umum.....	159
J. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah dan Pengadilan Negeri Muara Teweh..	162
BAB V KESIMPULAN.....	169
DAFTAR PUSTAKA.....	171
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penyerahan Tanah Ulayat untuk Usaha Perkebunan, IUP dan HGU dalam UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No. 39 Tahun 2014.....	44
Tabel 4.1 Daerah Administratif Kalimantan Tengah	105
Tabel 4.2 Wilayah Administratif Kabupaten Barito Utara.....	107
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Dalam Usia Produktif.....	108
Tabel 4.4 Profesi/Pekerjaan Kepala Keluarga Usia Produktif.....	108
Tabel 4.5 Perbedaan Struktural Pemerintahan Formal dan Pemerintahan Substantif.....	133
Tabel 4.6 Kesepakatan Penyerahan Tanah Adat, Penerbitan IUP dalam Kaedah Normatif dan Fakta.....	138
Tabel 4.7 Proses Pelepasan Tanah Adat di Desa Butong.....	152
Tabel 4.8 Proses Pelepasan Tanah Adat di Desa Kemawen.....	157
Tabel 4.9 <i>Rechtsvinding</i> Dasar Hukum Penetapan Nilai Ganti Kerugian Pelepasan Tanah Adat Suku Dayak Taboyan di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.....	161

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Alur Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Peradilan Adat.....	62
Gambar 4.1 Kabupaten Barito Utara dalam Peta Administratif....	106
Gambar 4.2 Bagan Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah..	131

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SKTA
- Lampiran 2 MoU Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan BPN
- Lampiran 3 Berkas Sengketa Tanah Adat Bapak Markuisi
- Lampiran 4 Berkas Pengaduan Sengketa Tanah Adat Bapak Asmari
- Lampiran 5 Berkas Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.sus/2015/PN.Mtw.
- Lampiran 6 SK Kelompok Tani Dayak Misik
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian